

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan abad 21 merupakan perkembangan era tanpa batas (*Boderless word*) ditandai dengan lalulintas barang, jasa, uang dan modal mengalir dari satu negara ke negara yang lain. Era globalisasi ditandai dengan semakin menyatunya negara yang satu dengan negara yang lain atau biasa disebut dengan negara tanpa batas. Kecenderungan ini ditandai dengan Perkembangan teknologi informasi ,ekonomi serta makin terbukanya perkembangan ekonomi dunia yang tentunya akan mempengaruhi dunia Mas'oed,(1999:239)

Perkembangan ekonomi dunia memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi, pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Krisis ekonomi dunia misalnya seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia berada dalam posisi tidak berdaya. Masyarakat Indonesia begitu lemah, rentan dan sangat tergantung dan tidak memiliki daya tahan cukup kuat menghadapi goncangan krisis itu sehingga begitu krisis global dan regional menghantam masyarakat, maka masyarakat Indonesia langsung jatuh terpuruk menjadi korban krisis. Kondisi ini semakin buruk karena negara tidak mampu menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat. Mengutip pandangan Castell di Ritzer (2009:633) negara semakin tidak berdaya ditengah- tengah globalisasi ekonomi.

Dampak dari ini semua masyarakat miskin semakin berada dalam kondisi yang rentan. Pasar, teknologi, kultur menjerat dan melemahkan posisi masyarakat.

Ketidakberdayaan masyarakat sebenarnya sudah berlangsung lama. Selama ini penetrasi kapital dan kooptasi orde baru begitu kuatnya mencengkram masyarakat sipil sehingga membuat masyarakat sipil sangat bergantung pada negara. Sehingga ketika negara mengalami krisis, masyarakat sipil mendapatkan dampak juga. Oleh karena itu strategi pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, otonom, mampu dan berdaya mengatasi krisis merupakan sesuatu yang tepat dan diperlukan saat ini. Pemberdayaan masyarakat harus mampu membangun strategi dan agenda aksi yang menumbuhkan kemandirian masyarakat, menumbuhkan inisiatif dan partisipasi lokal untuk mengubah (*transforming*) masyarakat secara emansipatoris menjadi mandiri dan otonom dan membebaskan (*Liberating*) (Trijono, dalam Strategi pemberdayaan Komunitas lokal menuju kemandirian, (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 5, nomor 2/2001:216-217).

Cistenson dan Robinson (1983:3) dalam Soetomo (1998:65) mengatakan bawa memasuki abad 21 tuntutan kepada komunitas lokal untuk lebih mampu mengelola aktivitas pembangunan pada tingkat lokal secara lebih mandiri dengan argumentasi yang berpangkal dari kenyataan tentang kompleksitas pertumbuhan masyarakat dan peningkatan interdependensi dalam sistem ekonomi dunia. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah termasuk negara – negara sedang berkembang harus banyak mencurahkan perhatian pada kebijaksanaan yang bersifat makro. Dengan demikian akan menjadi tidak realistis

apabila penanganan masalah-masalah lokal semata-mata menggantungkan pada kebijaksanaan, program, dan dana yang berasal dari pemerintah. Untuk itu partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas lokal dalam proses pembangunan sejak proses perencanaan sampai pelaksanaannya sangat penting. Prasarana utama bagi kondisi ini adalah tumbuh dan berkembangnya kompetensi dan tanggungjawab sosial masyarakat terhadap proses pembangunan pada tingkat komunitas. Dalam konteks ini, Selo Sumardjan (1993:124) mengemukakan tiga syarat yang dibutuhkan rasa ingin memperbaiki nasib, rasa kepercayaan diri dan keberadaan *critical mass* yang merupakan kelompok masyarakat yang mampu melihat lebih jauh dan lebih luas dari warga masyarakat yang lain. (Menempatkan masyarakat pada posisi sentral pembangunan oleh Soetomo h 65 jurnal ilmu sosial dan politik Volume 2 no1/1998 Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Gadjah mada).

Di Indonesia Penduduk miskin terbanyak berada di daerah pedesaan, oleh karena itu maka upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk kasus Indoensia, banyak pengamat menilai bahwa peranan pemerintah dalam proses pembangunan terlampau besar dibandingkan dengan peranan masyarakat sendiri melaui berbagai program yang sentralistik, *top down*, ditambah dengan kehadiran beberapa lembaga yang sengaja diciptakan untuk mendukung program tersebut

Proses pembangunan harus mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi salah satunya adalah perubahan kelembagaan. Sujogyo (1982:32-82) dalam Soetomo (1998:69) mengatakan bahwa setiap perubahan belum bisa dikatakan sebagai pembangunan sepanjang masyarakat belum mempunyai kelembagaan dan organisasi yang mampu menggerakan masyarakat

Sejauh ini, sebenarnya berbagai kalangan telah merintis upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kegiatan, seperti pemberdayaan

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan politik, pemberdayaan perempuan. Hal ini terutama dirintis dan dilakukan oleh LSM. Perlu disadari bahwa banyak upaya pemberdayaan belum signifikan memberikan perubahan karena lemahnya strategi pendekatan program pemberdayaan yang dilakukan.

Pembangunan desa secara seragam mengabaikan dan melupakan bahwa desa dibangun oleh pengalaman panjang konflik dan konsensus yang membangun ketahanan bangunan sosial yang kuat yang memiliki keberagaman dari sejarah dan struktur sosial yang memiliki sistem sosial yang kuat, energi sosial melalui kapital sosial dan kedaulatan politik. Pemahaman tentang desa secara seragam telah menyederhanakan cara pandang terhadap desa dimana desa hanya dilihat sebagai organisasi pemerintahan desa dan mengabaikan pengalaman, keberagaman dan kekuatan yang ada di desa.

Identitas dan kekhasan .masing-masing desa semakin lama semakin pudar. Desa yang semula hidup dengan segala perbedaan atau kebhinekaannya (*pluralisme*), kini secara administratif dan birokratis cenderung makin seragam karena campur tangan negara (*unitarisme*). Kehadiran Undang- Undang Nomor 5/1979 mengenai Pemerintah Desa yang menghenadaki kesamaan dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa di seluruh Indonesia adalah pemicu pertama kali dimulainya penyeragaman kegiatan pembangunan di Indonesia secara nasional (Bagong, dalam Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 4/ 2001:28)

Hal ini semakin diperparah dengan terbangunnya realitas sosial masyarakat tentang konsep orang desa oleh negara, pasar dan juga lembaga

swadaya masyarakat sebagai kelompok orang yang tidak berdaya, lemah, bodoh, pendidikan rendah, tidak memiliki kapasitas. Identitas ini diberikan dan diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai sebuah kenyataan tanpa ada upaya perlawanan sebagai konstruksi sosial. Ide ini dikonstruksi secara lama dan terus menerus dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui beberapa ungkapan: saya hanya orang desa yang bodoh mau bisa apa. Berger dan Lucmann (1990:xx,Nugroho 1999:123) dalam Bungin 2006:196 mengatakan bahwa realitas sosial masyarakat adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial

Hal ini dapat dibaca dalam pendekatan program yang dilakukan di desa masih menggunakan pendekatan konvensional, karitatif, melestarikan ketergantungan, bersifat *top down*, kurang menghargai proses dan partisipasi masyarakat luas, sehingga belum mampu membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu ketidakberdayaan. Pendekatan konvensional, menggunakan pendekatan masalah dimana masyarakat diajak untuk menemukan sebanyak-banyaknya masalah yang ada di desa dan pihak luar seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah akan membantu menyelesaikan semua masalah yang ada.

Masyarakat sebagai obyek dan kelompok yang tidak berdaya, lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sehingga dalam mendorong perubahan hanya mungkin jika dibantu oleh orang luar atau pihak diluar desa. Masyarakat desa, dianggap tidak memiliki pengetahuan untuk

terlibat memikirkan bagaimana membuat perencanaan yang baik, melakukan perubahan, sehingga butuh pihak luar untuk memikirkan program yang tepat, dan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan desa untuk berubah. Hal ini melahirkan banyak sekali program yang dirancang dengan cara pandang pihak luar.

Masyarakat desa dibuat menjadi tergantung pada negara dan pihak luar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gramsci yang dikutip oleh Sugiono 1999:31 dalam Bungin (2008:196) negara melalui alat pemaksa seperti birokrasi, administrasi maupun militer ataupun supremasi terhadap masyarakat dengan mendominasi kepemimpinan moral dan intelektual secara kontesktual. Kondisi dominasi ini kemudian berkembang menjadi hegemoni kesadaran individu pada setiap warga masyarakat sehingga wacana yang diciptakan oleh negara akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari hegemoni itu (Bungin, 2006:196). Konstruksi ini dilihat sebagai kelemahan oleh warga sehingga mematikan daya juang, melemahkan spirit dan mimpi untuk perubahan.

Menurut McKnight dan Kretzmann (1993: 34), jika peta masalah dan kebutuhan adalah satu-satunya panduan untuk komunitas miskin, maka bisa jadi konsekuensinya adalah sebuah komunitas yang terus menganggap dirinya mampu bertahan hanya dengan menekankan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Ketika kehidupan mereka bergantung akan daftar ini, anggota komunitas mulai percaya akan gambaran negatif di diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat dirinya selalu kekurangan dan tidak mampu

mengambil kendali akan hidup mereka dan untuk lingkungannya. Mereka akan selalu dan tidak bisa terhindar untuk melihat dirinya sebagai entitas yang ‘tidak berdaya’ atau yang paling berhak menerima bantuan pemerintah tanpa ada upaya untuk melakukan tindakan atas nama mereka sendiri.

Dampak lain dari kondisi tersebut adalah munculnya kepemimpinan yang hanya mampu untuk mencetak gambaran negatif atas masyarakatnya. Ketika peta kebutuhan adalah satu-satunya hal yang mereka miliki untuk menggambarkan kenyataan, para pemimpin tersebut akan berpikir bahwa cara paling tepat untuk menarik bantuan dari berbagai institusi eksternal adalah hanya dengan meningkatkan tingkat kebutuhan atau permasalahan tersebut. Kepemimpinan lokal kemudian dihargai dari berapa banyak bantuan sumber daya luar yang berhasil ditarik masuk ke masyarakat, bukan seberapa jauh tingkat kemandirian masyarakat.

Menarik bantuan sebanyak – banyaknya dari luar adalah salah satu indikator kinerja pemimpin yang baik dan akan mendapatkan simpati dari warga. Kondisi Indonesia termasuk Sumba yang menganut sistem demokrasi langsung dalam pemilihan pemimpin memberikan ruang/ peluang bagi pemimpin di daerah tersebut untuk menggunakan pendekatan ini sebagai strategi menggalang dukungan dan menarik simpatik warga terutama warga miskin yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok jangka pendek.

Selanjutnya apa yang terjadi, kapital desa seperti modal sosial, aset individu, aset fisik dan sumberdaya alam, sumberdaya sosial seperti kerja gotong royong, musyawarah adat, tradisi lumbung desa, arisan, dll justru mengalami

degradasi. Partisipasi identik dengan mobilisasi warga dengan iming- iming uang penggantian transport, uang duduk dan lain- lain. Partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan seperti perempuan miskin, penyandang difabel, lansia dan kelompok rentan lainnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari integral masyarakat bahkan tidak dapat terlibat berpartisipasi dan berkontribusi atas pembangunan di desa karena tidak diberikan ruang untuk terlibat.

Banyak program yang dirancang tidak terintegrasi, misalnya setiap kementerian membuat program masing- masing di desa dengan nama yang berbeda-beda dan dengan kelompok yang berbeda- beda, akibatnya warga dikelompokkan sesuai dengan bidang isu dan bidang program masing- masing sehingga begitu banyak kelompok di desa yang dibentuk sangat instan untuk merespon bantuan yang ada. Akibatnya terjadi tumpang tindih program, sasaran program yang sama dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme bantuan desa, sehingga dampak akhirnya adalah banyak masyarakat menjadi tidak saling percaya, saling curiga, lemahnya modal sosial, tidak peduli dengan pembangunan yang ada di desanya sehingga menyebabkan masyarakat tersegmentasi. Satu hal pokok dari berbagai kelemahan dari pendekatan yang pernah ada adalah, walaupun secara konsep berbagai pendekatan tersebut sangat baik, namun dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dilakukan.

Persoalan pokoknya karena terkotak-kotaknya pembiayaan pembangunan pada berbagai departemen dan institusi serta tidak adanya satu kekuatan yang dapat memaksakan terjadinya integrasi antara berbagai program tersebut

(Bagong, dalam Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 4/ 2001:29)

Dampak dari semua ini maka desa menjadi tempat yang tidak menarik lagi. Apa indikator yang bisa dibaca ketika desa dianggap kurang menarik adalah angka urbanisasi meningkat, TKW meningkat, banyak tenaga kerja produktif meninggalkan desa mencari pekerjaan di kota tanpa modal pengetahuan dan pendidikan yang memadai yang menimbulkan masalah sosial baru seperti penjualan perempuan dan anak, eksploitasi pekerja. Akibat komunitas pedesaan di Indonesia yang semula bercirikan *ruralisme* dan *pluralisme*, pelan namun pasti makin bergeser dan bahkan berubah ke arah *urbanisme* dan *unitarisme* seperti dikutip oleh Bagong (Soemardjan, dalam: Masyarakat, Jurnal Sosiologi, Volume 2/1990: 11). Desa yang semula sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor pertanian dan berpegang kuat pada adat yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan (*ruralisme*), kini cenderung makin individualistik di dalam aneka - ragam profesi non-agraris, dan peran adat pun biasanya hanya menonjol pada kegiatan seremonial atau upacara yang tak memiliki kekuatan untuk mengontrol perilaku warga (*urbanisme*).

Desa Kalingara adalah salah satu desa miskin yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 83%. Berdasarkan Data RPJMDes Kalingara kondisi kesehatan masyarakat cukup rendah hal ini ditandai dengan angka gisi buruk pada balita sebesar 21%, ibu melahirkan meninggal karena terlambat mendapatkan pertolongan 3

orang, tingkat kesakitan tinggi. Di bidang Pendidikan, jumlah anak putus sekolah pada tingkat SMP dan SMA 32%. Di bidang ekonomi, pendapatan masyarakat rendah.

Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan pembangunan di desa yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dengan dana yang sangat besar. Berdasarkan data desa sejak tahun 2013-2015 banyak sekali bantuan yang telah diberikan bagi masyarakat Kalingara oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Jumlah dana yang masuk ke desa sejak tahun 2013 sebesar 4,5 milyar yang diberikan dalam bantuan berupa bantuan anak sekolah dan balita melalui dana PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan anak balita, bantuan anak sekolah sebesar Rp 600.000-1.000.000/tahun. Bantuan dari program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha berupa usaha simpan pinjam bagi perempuan sebesar 10 juta/klp. Bantuan ANGGUR Merah berupa ternak dan modal usaha kelompok. Dana Alokasi Desa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) per tahun. Besarnya jumlah dana yang masuk ke desa tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat Kalingara yang lebih baik hal ini dilihat dengan masih tingginya angka kemiskinan di desa.

Berangkat dari kondisi ini maka dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mampu membangun strategi dan agenda aksi yang menumbuhkan kemandirian masyarakat, menumbuhkan inisiatif dan partisipasi

lokal untuk mengubah (*transforming*) masyarakat secara emansipatoris menjadi mandiri, otonom dan membebaskan (*Liberating*).

Pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset hadir sebagai respon terhadap kegagalan pendekatan konvensional. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya keterlibatan warga dalam menemukan potensi dan mendayagukanya secara aktif dalam proses pemberdayaan. Hal ini dengan memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat aktif dan menggunakan aset dan kemampuan lokal untuk dapat melakukan perubahan. Pengembangan masyarakat berbasis aset memberikan ruang pengakuan akan kekuatan dan kemampuan semua aktor dalam masyarakat untuk terlibat memikirkan, menyumbangkan kekuatan masing-masing untuk mengerjakan perubahan secara bersama-sama. Kelompok-kelompok rentan seperti keluarga miskin, penyandang difabel, lansia, kelompok marupu, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan di masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berbasis aset dapat membantu menciptakan komunitas lokal dengan kepemimpinan yang berdedikasi yang dapat mentransformasi kehidupan masyarakat lokal dan kondisi kehidupan sosialnya.

Berangkat dari hal ini maka dalam penelitian ingin melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset lokal yang dilakukan di desa Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil penelitian yang diharapkan adalah

terpetakannya aset lokal yang ada di masyarakat dan bagaimana aset lokal ini dapat digunakan untuk pemerdayaan masyarakat di desa Kalingara.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Desa Kalingara memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 83,2%. Ada begitu banyak program pemberdayaan yang masuk di desa seperti program PKH (Program Keluarga Harapan), program PNPM Mandiri untuk bantuan pendidikan, infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bantuan yang diberikan belum signifikan memberikan perubahan hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat desa. Hal lain yang juga menjadi persoalan adalah bantuan yang diberikan tidak berkembang dan tidak berlanjut serta membuat masyarakat bergantung. sumberdaya lokal belum didayagunakan sebagai kekuatan dalam memberdayakan masyarakat.

Potensi- potensi lokal seperti sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya sosial, sumber daya fisik, modal sosial belum dipetakan dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 2 masalah pokok yaitu apa saja potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Kalingara dan bagaimana menggunakan aset lokal dalam pemberdayaan masyarakat.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Memetakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Kalingara
2. Mendapatkan gambaran pemanfaatan aset lokal bagi pengembangan masyarakat desa Kalingara

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Mendapatkan gambaran tentang kondisi umum masyarakat desa Kalingara dan data dasar potensi sebagai acuan dalam merancang rencana strategi pembangunan desa Kalingara.
2. Memberikan gambaran peluang- peluang pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan.
3. Membantu pemerintah Sumba Barat Daya dalam upaya pengembangan masyarakat miskin di Sumba Barat Daya.

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

1.5.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif seperti yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara kekinian. Diharapkan terjadi pembelajaran secara langsung, sehingga penanganan permasalahan (kesejahteraan sosial), peningkatan peran lembaga lokal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara mereka sendiri.

Menurut Meolong(2011:6) “pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara

holistik,dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Menurut Moelong(2011: 8)” Dalam penelitian kualitatif peran peneliti sangat penting sekali. dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen/alat pengumpul data utama”.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga mudah bagi peneliti untuk mendapatkan banyak informasi dan sekaligus sebagai alat bantu untuk validasi data hasil wawancara dengan individu atau kelompok. peneliti terlibat secara interaktif dengan subjek, dan berperan dalam membentuk realitas baru. Demikian juga sebaliknya, realitas secara interaktif memperkaya pengetahuan dan makna sosial seorang peneliti.Informasi yang didapatkan lebih banyak, beragam dan detail tentang gambaran potensi yang ada di masyarakat dan dapat membantu mereka untuk mendayagunakan potensi yang ada untuk pemberdayaan masyarakat.

1.5.2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian sederhana yang bersifat partisipatif. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi peneliti sekaligus fasilitator yang membantu individu dan kelompok di desa Kalingara memetakan kondisi kehidupan masyarakat Kalingara, membangun Visi Perubahan dan bagaimana memanfaatkan aset yang ada untuk memberdayakan masyarakat.

Kegiatan ini diawali dengan pemetaan aktor kunci di desa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi dan kondisi desa sekaigus dapat menjadi aktor yang melakukan perubahan di desa. Aktor- aktor kunci ini sekaligus menjadi informan untuk penelitian. Aktor kunci tersebut adalah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terbuka, baik secara individu maupun kolektif. Wawancara secara kolektif sifatnya menjadi lebih seperti diskusi bersama. Mengingat penelitian ini bersifat partisipatif, setelah terdapat temuan awal, temuan yang ada dianalisis dan didiskusikan bersama dengan warga kampung

1.5.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Meolong (2011:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi grup terfokus, mempelajari dokumentasi yang dilakukan.

Informan penelitian ini adalah aktor- aktor kunci di desa seperti aparat desa, tokoh masyarakat, pengurus kelompok Swadaya masyarakat ,kader posyandu, kader malaria, pendeta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terbuka, baik secara individu maupun kolektif.

Data penelitian dibagi menjadi dua(2) yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer:

Data primer adalah data yang langsung didapatkan peneliti dari hasil penelitian di lapangan, sehingga hasil data primer merupakan data yang diperoleh khusus untuk penelitian yang dimaksudkan. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Menurut Mulyana Dedy (2008:180) Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan daftar pertanyaan yang berisis pokok-pokok masalah dengan pihak-pihak yang sengaja dipilih. \

Wawancara secara kolektif dilakukan dengan cara diskusi terfokus dalam kelompok berdasarkan dusun. Diskusi terfokus dilakukan 5 kali yaitu 4 kali diskusi tingkat dusun dan 1 kali diskusi tingkat desa. Diskusi dusun dilakukan untuk mendapatkan temuan awal tingkat dusun lalu kemudian dianalisis tingkat desa secara bersama- sama yang dihadiri oleh semua peserta diskusi tingkat dusun

b) Observasi partisipatif

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan hal-hal tertentu yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan berkeliling desa, melakukan kunjungan rumah, melihat aktivitas warga, terlibat dalam aktivitas warga secara langsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang melengkapi data primer. Dalam hal ini, data sekunder dapat diambil dari kepustakaan, internet serta hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian dan sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan subjek penelitian. Selain melengkapi, data sekunder akan sangat membantu bila data primer susah untuk diperoleh.

1.5.4 TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisa data dilakukan secara langsung bersama dengan masyarakat dalam semua proses. Wawancara secara kolektif dilakukan dengan cara diskusi terfokus dalam kelompok berdasarkan dusun. Diskusi terfokus dilakukan 5 kali yaitu 4 kali diskusi tingkat dusun dan 1 kali diskusi tingkat desa. Diskusi dusun dilakukan untuk mendapatkan temuan awal tingkat dusun lalu kemudian dianalisis tingkat desa secara bersama-sama yang dihadiri oleh semua peserta diskusi tingkat dusun.